

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Tingkat inflasi/deflasi Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2022

No	Bulan (2022)	Inflasi/deflasi per bulan (mtm) %	Inflasi/deflasi kumulatif (ytd)%	Inflasi/deflasi Tahunan (yoy)%	Komoditi Penyumbang inflasi/deflasi	penyebab
3	April	0,96	2,59	3,60	minyak goreng, angkutan udara dan telur ayam ras	kenaikan harga komoditi akibat kenaikan bahan baku energy secara global dan dimand yang meningkat
4	Mei	0,83	3,44	4,44	angkutan udara, cabe merah, bawang merah, telur ayam ras	kenaikan permintaan komoditi menjelang dan sesudah hari raya Idul Fitri
5	Juni	0,89	4,36	5,39	cabe merah, bawang merah, dan telur ayam ras	kenaikan harga masih pengaruh dari berkurangnya ketersediaan stok setelah hari besar keagamaan

- Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dari 2 Kota IHK yaitu Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Beberapa komoditi pangan pada triwulan II mengalami kenaikan yaitu cabai merah, bawang merah, daging ayam ras dan Minyak Goreng.

Beberapa komoditi pangan pada triwulan II cenderung mengalami kenaikan, Hal ini dikarenakan adanya kenakan permintaan mendekati hari H dan setelah hari raya besar keagamaan (Idul Fitri1443H), dan untuk harga minyak goreng per triwulan II masih bervariasi, pada triwulan II rata-rata harga minyak goreng dipasaran dijual Rp. 25.000. sedangkan harga tertahan dengan adanya subsidi dari pemerintah pusat, masyarakat masih dapat membeli minyak kemasan seharga Rp. 14.000,- dari pemerintah daerah melalui Operasi Pasar Murah (OPM), namun kemungkinan harga minyak goreng akan tetap mengalami kenaikan untuk bulan kedepannya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan ke II, Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan telah melebihi target capaian nasional yaitu lebih dari 4% khususnya pada bulan Mei dan Juni, hal ini dikarenakan kenaikan bahan komoditi baku energy yang dipengaruhi oleh harga pasar dunia dan berimbas ke Indonesia. Kenaikan terhadap bahan baku BBM di pasar dunia menyebabkan kenaikan terhadap biaya operasional seperti biaya angkut/transportasi sehingga berimbas juga dengan naiknya komoditi bahan pangan.

Selain itu kenaikan permintaan terhadap beberapa komoditi bahan pangan pokok dikarenakan menjelang bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri 1443 H dan berkurangnya stok/persediaan komoditi pangan pasca hari besar keagamaan. Seperti Komoditi ayam dan telur ayam ras untuk produksi lokal mencukupi namun dikarenakan peningkatan permintaan dari luar daerah mengakibatkan berkurangnya stok dalam daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa masalah kenaikan inflasi dikarenakan kenaikan akan permintaan, dan upaya agar ketersediaan pangan tetap terjaga. Rapat koordinasi telah dilakukan dalam rangka mengantisipasi menyambut bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri. Beberapa upaya program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Perangkat daerah Provinsi dalam rangka melaksanakan pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan dengan berpedoman pada strategi pengendalian inflasi 4K yaitu :

1. **Ketersediaan pasokan** antara lain melalui;

- a. Pelaksanaan program unggulan Sumsel Mandiri Pangan berupa pemberian bibit pertanian untuk rumah tangga miskin di 17 kab/kota Sumatera Selatan dan pemberian perlengkapan budidaya perikanan di 17 kabupaten/kota; Pada triwulan II tahun 2022 ini, Pengkoordinasian Pelaksanaan GSMP beradaptasi pada 5 OPD yang memegang beberapa daerah kabupaten/kota sebagai daerah Pembagian daerah tersebut antara lain:
 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, mengkoordinir daerah Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kota Lubuk Linggau.
 - Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, mengkoordinir daerah Kabupaten Penungkal Lematang Ilir, Muara Enim, Lahat dan Kota Pagar Alam.
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, mengkoordinir daerah Kabupaten OKU, OKUT, OKUS dan Ogan Komering Ilir.
 - Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, mengkoordinir daerah Kota Palembang, Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin.
- b. Pengembangan sentra bawang merah di Kabupaten Musi Rawas Utara melalui penyediaan bibit bawang merah serta pelatihan budidaya;
- c. Pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari di Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau,
- d. Implementasi GASSPOL (Palembang Jaga Pasokan, harga, distribusi lewat Pasar Online) melalui aplikasi Bajolbae yang diterapkan di 10 (sepuluh) pasar;
- e. Implementasi digital farming pada klaster cabai dan bawang merah binaan BI Sumatera Selatan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Kegiatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) komoditas pangan, khususnya oleh Perum Bulog;
- g. Pelatihan UMKM pengolahan pakan lokal serta edukasi terkait Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

2. **Keterjangkauan harga** melalui;

- a. Monitoring harga komoditas bahan pokok secara harian oleh dinas terkait,
- b. Pelaksanaan operasi pasar di Kota Palembang oleh Perum Bulog dan dinas terkait,
- c. Pembelian Beras setiap bulannya oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan yang dikoordinir oleh OPD masing-masing bekerja sama dengan perum Bulog, sebagai himbauan dari Gubernur Sumatera Selatan untuk menggunakan beras petani lokal dalam rangka menekan hargadan menjaga tingkat inflasi pada komoditi beras.

- d. Pelaksanaan gelar pasar murah oleh Toko Tani Center Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan Prov,Sumsel dan pasar tani secara mingguan oleh Dinas Pertanian Prov. Sumsel.

Serta Pelaksanaan Pasar Murah Dinas Perdagangan pada tanggal 18-19 April2022 di halaman Kantor Camat Sako Palembang, dan tanggal 20-21 April 2022 bertempat di Halaman Pasar Alang-Alang Lebar Palembang.

3. Memastikan **Kelancaran distribusi** dengan:

- a. Melakukan sidak pasar komoditas dan monitoring pasar di Kota Palembang dipimpin oleh Wakil Walikota Palembang;
- b. Memprioritaskan angkutan komoditas bahan pangan, BBM dan komoditas strategis lainnya selama masa pandemi;
- c. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi “Market Place Sibejajo”

4. **Komunikasi yang efektif** melalui;

- a. Rapat Monitoring ketersediaan minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan, pada Hari Selasa tanggal 26 April 2022 bertempat Ruang Rapat Griya Agung Palembang; dipimpin oleh Gubernur Sumatera Dasar pelaksanaan menindaklanjuti arahan Presiden RI tentang larangan Ekspor CPO per akhir April. Permendagri No 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga EceranTertinggi (HET) Minyak Goreng Curah.
- b. Rapat lanjutan Monitoring ketersediaan minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan, pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 bertempat Ruang Rapat Dinas Perdagangan Prov. Sumsel; dipimpin oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dasar pelaksanaan menindaklanjuti arahan Presiden RI tentang larangan Ekspor CPO per akhir
- c. Rapat Koordinasi tanggal 12 Mei 2022, Surat Komisaris Besar Polisi Ditreskrimsus Polda Sumsel B/51/V/RES.2.1/2022/ Ditreskrirmsus tanggal 11 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Koordinasi. Pelaksanaan rapatpada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 10.00 wib; rakor terkait ketersediaan produksi serta distribusi minyak goreng curah yang ada di Prov. Sumsel. Dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Perindustria, Kepolisian serta Produsen dan Distributor Minyak Goreng. Kesimpulan:
 - Kuota penugasan minyak goreng curah di Provinsi Sumatera Selatan telahsesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - Masih terdapat beberapa di daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami kekosongan pasokan minyak goreng, dikarenakan;
 - Kurangnya Sub-Distributor (D-2) dan Pengecer (D-3) di 11 (sebelas) kabupaten/kota.
 - Pembayaran subsidi atau rafaksi masih belum sepenuhnya lancer di kementerian
- d. koordinasi pengendalian inflasi oleh TPID di wilayah Provinsi Sumatera Selatan melalui whatsapp group TPID.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kegiatan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan terus digencarkan di 17 kabupaten/kota, untuk mengubah mindset masyarakat dari pembeli menjadi penjual. Kegiatan ini sangat baik untuk dapat terus ditindaklanjuti, Gerakan Sumsel mandiri telah diupayakan melalui Tim Penggerak PKK, masyarakat desa/kelurahan, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya hingga ke sekolah-sekolah.
2. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pangan dan saat ini khususnya menjaga stabilitas harga minyak goreng yang harganya masih terus naik, Namun kegiatan operasi pasar murah hanya dapat membantu masyarakat dalam jangka pendek.
3. Pelaksanaan Pasar Murah/bazar telah dilakukan dari awal tahun 2022 oleh OPD terkait seperti (dinas Perdagangan, dinas ketahanan Pangan dan Peternakan, dinas perindustrian) dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditi barang tertentu terutama saat menjelang bulan puasa dan menyambut hari raya. Namun dilaksanakan masih terbatas oleh anggaran dan sumber daya, sehingga belum dapat dirasakan secara merata/menyeluruh oleh masyarakat yang berpenghasilan

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah antisipasi perlu segera dirumuskan dengan tujuan untuk mencapai tingkat inflasi yang stabil. Saran dan masukan memperhatikan Kondisi tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II tahun 2022 Beberapa hal yang perlu ditempuh antara lain :

1. Koordinasi yang berkesinambungan dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Instansi terkait seperti satgasda pangan sumsel (Polda Sumsel) dalam rangka kelancaran dan pengamanan terhadap ketersediaan komoditi pangan penting khususnya saat ini yaitu komoditi minyak
2. Mendorong percepatan Pelaksanaan Pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung kelancaran produksi dan distribusi bahan
3. Mengelola ekspektasi masyarakat melalui proses komunikasi dan publikasi mengenai ketersediaan Komoditas Pangan sehingga masyarakat tidak panic buying.
4. Penganggaran dari pemerintah daerah yang cukup mendukung dalam rangka subsidi pemerintah terhadap komoditi pangan yang mengalami
5. Pelaksanaan Pasar Murah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pangan dan saat ini khususnya menjaga stabilitas harga minyak goreng yang harganya masih terus naik, Namun kegiatan operasi pasar murah hanya dapat membantu masyarakat dalam jangka pendek maka perlu upaya yang berkelanjutan untuk operasi pasar murah selama kondisi pasokan bahan bakar global belum
6. Pemerintah Daerah perlu bekerja sama dan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota, instansi terkait (BI, Bulog, Kepolisian), distributor/produsen Minyak Goreng, BUMN, BUMS dan pihak lainnya dalam rangka menggiatkan pasar murah.
7. Perlu peran aktif BUMD Pangan dalam hal penyediaan stok bahan pangan pokok agar harga bahan pangan pokok dapat terkendali, BUMD dapat berfungsi sebagai penyerap produksi petani, sekaligus distribusi dan pemasaran dan berpihak pada kepentingan rakyat karena BUMD adalah milik pemerintah
8. Peningkatan koordinasi antar TPID Provinsi dan kabupaten/kota dapat meningkatkan

dan menjadi wadah kerjasama dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok baik dari sisi produksi/teknologi produksiterhadap peningkatan kapasitas dan intensitas produksi, dan dari sisi pemasaran/kelancaran distribusi sampai ke pada masyarakat (konsumen).